

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwith Management, Sistem Management Database	Private - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
2	Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	- UU. No.14 Tahun 2008 Pasal 17 - PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 - UU No.19 Tahun 2016 Pasal 30-37 - Permenkominfo No.4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan informasi dan data	Keamanan data dan informasi	Selama masih digunakan
3	Berita Sandi, Kunci Sistem Sandi, Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 Tahun 200 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
4	Biodata ASN di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

6	Daftar Nilai Kinerja ASN di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 huruf I UU No.14/2008, - UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
7	Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut Lampirannya	- UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan panyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Selama belum diperiksa oleh pihak yang berwenang
8	Memorandum /Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat antar Perangkat Daerah atau Intra Perangkat Daerah yang menurut sifatnya tidak dapat disediakan untuk pihak lain.	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf i	Dapat membocorkan dokumen Badan Publik yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen/arsip Badan Publik	Tidak Terbatas
9	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Handphone Kelompok Tani	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Kepala,


 Ir. NUZIRWAN, N.MT
 NIP. 19670826 199803 1 001